

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan era *digital* menjadikan pengelolaan administrasi dan keuangan yang efisien serta efektif sebagai aspek krusial bagi instansi pemerintah. Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo, sebagai lembaga penyedia layanan publik, memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pegawainya. Fokus utama peningkatan ini berada pada Subbagian Umum dan Keuangan yang memegang peran vital dalam operasional sehari-hari.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningtyas), sistem evaluasi kinerja yang masih menggunakan metode manual kerap menghadapi berbagai kendala, seperti adanya subjektivitas, ketidakkonsistenan dalam penilaian, serta waktu pemrosesan yang relatif lama. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan pada sistem evaluasi agar menjadi lebih akurat dan efisien, sehingga dapat mendukung optimalisasi kinerja pegawai.

Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang untuk mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang dapat membantu membuat proses evaluasi kinerja lebih terstruktur dan objektif. Menurut (Prayoga dan Pribadi), penerapan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam evaluasi kinerja pegawai dapat meningkatkan akurasi penilaian hingga 85% dibandingkan dengan metode konvensional. Temuan ini menegaskan efektivitas Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam mengurangi subjektivitas serta meningkatkan kejelasan kriteria penilaian, sehingga memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan terukur.

Metode *Preference Selection Index* (PSI) muncul sebagai pendekatan efektif dalam pengambilan keputusan multi-kriteria. Menurut (Sintaro), metode *Preference Selection Index* (PSI) menunjukkan keunggulan dalam hal konsistensi hasil dan kemudahan implementasi dibandingkan dengan metode *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) lainnya. Temuan ini

menyoroti efektivitas *Preference Selection Index* (PSI) sebagai alat yang dapat diandalkan dalam proses evaluasi dan pemilihan, serta kemampuannya untuk memberikan hasil yang lebih objektif dan terukur.

Observasi awal di Sub-bagian Umum dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa proses evaluasi kinerja masih dilakukan secara manual tanpa standar penilaian yang terukur. Menurut (Indrashwara dan Udariani), sebagian besar instansi pemerintah daerah masih mengandalkan sistem manual dalam proses evaluasi kinerja pegawai. Hal ini mencerminkan perlunya transformasi menuju sistem yang lebih modern dan efisien untuk meningkatkan efektivitas penilaian kinerja dalam lingkungan pemerintahan.

Implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) dipandang sebagai solusi yang tepat mengingat kemampuannya dalam mengakomodasi berbagai kriteria penilaian. Menurut (Safitri dkk.), penerapan metode *Preference Selection Index* (PSI) dapat secara signifikan meningkatkan objektivitas penilaian serta efisiensi waktu dalam proses evaluasi. Temuan ini menyoroti potensi metode *Preference Selection Index* (PSI) sebagai alat yang efektif untuk mengurangi bias subjektif dan mempercepat pengambilan keputusan dalam konteks seleksi karyawan.

Pengembangan sistem ini sejalan dengan program transformasi *digital* pemerintahan yang dicanangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Menurut (Maharani dan Tizaka), digitalisasi dalam proses evaluasi kinerja merupakan langkah strategis yang krusial untuk mewujudkan prinsip *good governance* di lingkungan pemerintahan. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik juga menjadi pertimbangan penting. Menurut (Titis Hapsari dan Ali), penerapan sistem pendukung keputusan dalam evaluasi kinerja dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dalam

pengelolaan keuangan dan mengurangi risiko penyimpangan administratif. Temuan ini menyoroti pentingnya sistem pendukung keputusan dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi.

Kebutuhan akan sistem yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek penilaian kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan semakin mendesak seiring dengan kompleksitas tugas di lingkungan pemerintahan. Menurut (Siregar dkk.), integrasi sistem informasi dalam evaluasi kinerja sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggabungan teknologi informasi yang efektif dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas di seluruh organisasi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pengembangan sistem pendukung keputusan untuk evaluasi kinerja administrasi dan pengelolaan keuangan menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) di Sub-bagian Umum dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Bungo dinilai sangat relevan dan mendesak. Sistem ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas evaluasi kinerja serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien di lingkungan instansi tersebut.

Maka dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul: **“SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE PREFERENCE SELECTION INDEX DI SUB-BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN DINAS PU KABUPATEN BUNGO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, berikut adalah tiga rumusan masalah yang dapat diangkat:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) dalam meningkatkan objektivitas dan akurasi evaluasi kinerja pegawai di Sub-bagian Umum dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Bungo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi kinerja pegawai administrasi dan pengelolaan keuangan secara manual, dan bagaimana sistem baru dapat mengatasi kendala tersebut?
3. Bagaimana sistem pendukung keputusan berbasis web yang dikembangkan dapat dipahami dan digunakan secara efektif oleh pihak Dinas PU Kabupaten Bungo?

1.3 Hipotesa

Hipotesa penelitian merupakan jawaban sementara dari pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka diperoleh jawaban sementara dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa penerapan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) akan meningkatkan objektivitas dan akurasi evaluasi kinerja pegawai di Sub-bagian Umum dan Keuangan Dinas PU Kabupaten Bungo.
2. Diharapkan bahwa sistem pendukung keputusan dapat mengurangi kendala yang dihadapi dalam proses evaluasi kinerja pegawai administrasi dan pengelolaan keuangan secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan konsistensi penilaian.
3. Diharapkan bahwa dengan pelatihan dan sosialisasi yang tepat, sistem pendukung keputusan berbasis web dapat dimengerti dan digunakan secara efektif oleh pihak Dinas PU Kabupaten Bungo, sehingga meningkatkan efisiensi dalam evaluasi kinerja pegawai.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan mudah dimengerti, serta permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas, maka diterapkan beberapa batasan masalah. Batasan-batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan hanya akan digunakan untuk evaluasi kinerja pegawai di Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo.
2. Sistem pendukung keputusan ini hanya menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) sebagai metode penyelesaian dalam penilaian kinerja pegawai.
3. Aplikasi ini akan berbasis *Website* dengan menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan *Database MySQL*.
4. Penelitian ini hanya akan mengandalkan data dan informasi yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara dengan pegawai di Dinas PU, tanpa mencakup data dari sumber eksternal lainnya.

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem pendukung keputusan berbasis *Website* untuk evaluasi kinerja pegawai di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo yang dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan.
2. Menerapkan metode *Preference Selection Index* (PSI) dalam sistem pendukung keputusan sehingga proses penilaian kinerja pegawai menjadi lebih objektif dan akurat.
3. Menghasilkan sistem yang efisien dan transparan dalam evaluasi kinerja pegawai, sehingga semua pihak dapat memahami dan menerima hasil evaluasi yang dihasilkan oleh sistem.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang hendak dicapai, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya sistem pendukung keputusan berbasis *Website*, manajemen Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo dapat melakukan evaluasi kinerja pegawai secara lebih objektif dan transparan.
2. Penerapan metode *Preference Selection Index* (PSI) dalam sistem ini memungkinkan penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan.
3. Dengan sistem ini, pegawai dapat memahami kriteria penilaian yang digunakan, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam bekerja.
4. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teknologi informasi di instansi pemerintah, khususnya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas evaluasi kinerja pegawai.
5. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem pendukung keputusan dan evaluasi kinerja di sektor publik.

1.7 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data valid dan menemukan solusi dari suatu topik permasalahan yang akan memudahkan penulis dalam menentukan hal yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Berikut merupakan gambaran secara umum dari objek pada penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo, yang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan

pelayanan publik terkait pekerjaan umum. Dalam konteks ini, objek penelitian adalah sistem evaluasi kinerja pegawai yang saat ini diterapkan di Dinas PU.

Sistem evaluasi kinerja yang ada masih mengandalkan metode manual, yang dapat menyebabkan subjektivitas dan ketidakakuratan dalam penilaian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis *Website* yang menggunakan metode *Preference Selection Index* (PSI) untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam evaluasi kinerja pegawai.

Dengan fokus pada pengembangan sistem ini, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai, serta bagaimana penerapan sistem baru dapat memberikan manfaat bagi manajemen dan pegawai di Dinas PU Kabupaten Bungo.

1.7.1 Sejarah Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo didirikan berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2017, dengan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur daerah. Melalui Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018, peraturan tersebut mengalami penyempurnaan. Sebagai perangkat daerah, Dinas PUPR memiliki tugas pokok dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, dinas ini juga bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur.

1.7.2 Visi dan Misi

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo: “Menjadi Dinas yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.”

Misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bungo adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur dengan pendekatan profesional dan berintegritas.
2. Mewujudkan kesesuaian antara perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kualitas jaringan pengairan dan penyediaan air baku untuk mendukung produksi pertanian, ketahanan pangan, perikanan, dan agroindustri.
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran transportasi menuju sentra perekonomian masyarakat.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan air bersih, pengelolaan air limbah, dan drainase yang berkualitas demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

1.7.3 Kegiatan Utama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo memiliki tugas utama dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang yang berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PU mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
 - c. Pembangunan sistem drainase dan pengendalian banjir

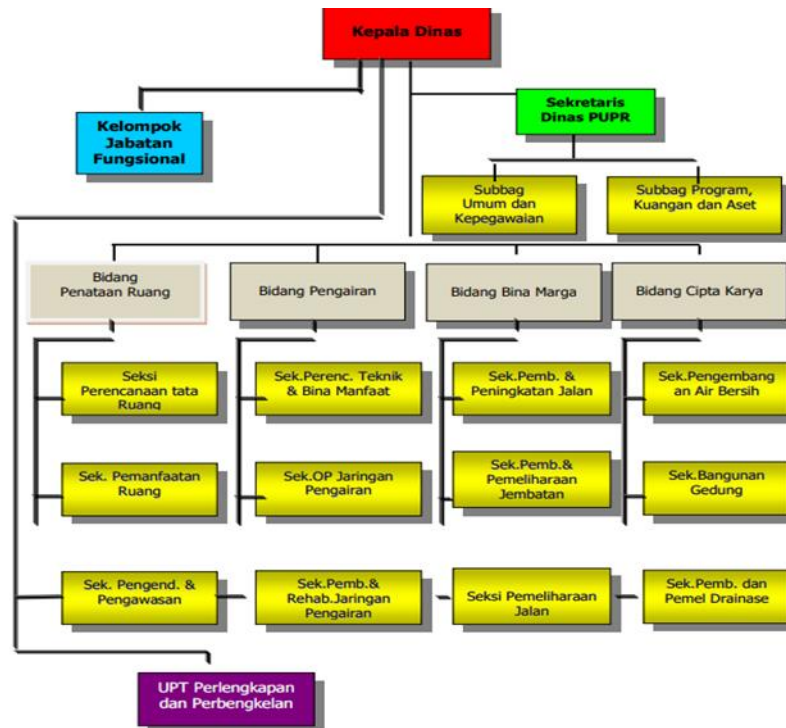
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
- 2. Penataan Ruang dan Tata Wilayah
 - a. Penyusunan rencana tata ruang wilayah
 - b. Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang
 - c. Penataan kawasan permukiman dan kawasan strategis
- 3. Pengelolaan Sumber Daya Air
 - a. Pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air
 - b. Penyuluhan dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan air
 - c. Pembangunan embung dan waduk untuk mendukung pertanian
- 4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur
 - a. Renovasi dan rehabilitasi bangunan publik
 - b. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan untuk aksesibilitas
 - c. Pengembangan fasilitas umum yang ramah lingkungan
- 5. Pengawasan dan Evaluasi
 - a. Pengawasan pelaksanaan proyek infrastruktur
 - b. Evaluasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan
 - c. Penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban

1.7.4 Alamat dan Letak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo terletak di Cadika, Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, dengan kode pos 37211. Lokasi Dinas PU ini strategis, berada di pusat pemerintahan daerah yang memudahkan akses bagi masyarakat dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

1.7.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo

Bagan struktur organisasi dan susunan pengelola Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bungo

1.7.6 Jabatan dan Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bungo memiliki struktur organisasi yang jelas, dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berikut adalah kegiatan berdasarkan struktur organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bungo:

1. Kepala Dinas

- Pengkoordinasian Kegiatan: Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- b. Penyusunan Kebijakan: Merumuskan kebijakan teknis terkait pembangunan infrastruktur.

2. Sekretariat Dinas

- a. Pelayanan Administrasi: Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- b. Koordinasi Internal: Mengelola komunikasi dan koordinasi antar bidang.

3. Bidang Penataan Ruang

- a. Perencanaan Tata Ruang: Menyusun rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang.
- b. Pengawasan Pemanfaatan Ruang: Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
- c. Seksi dalam Bidang Penataan Ruang
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang: Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan.
 - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang: Mengawasi penggunaan ruang sesuai dengan peruntukannya.
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian: Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana tata ruang.

4. Bidang Pengairan

- a. Pengelolaan Sumber Daya Air: Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan pengairan.
- b. Seksi dalam Bidang Pengairan
 - 1) Seksi Perencanaan Teknik: Merencanakan teknik pengelolaan sumber daya air.
 - 2) Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan: Melaksanakan pembangunan infrastruktur pengairan.

- 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pengairan: Mengawasi dan memelihara jaringan pengairan.

5. Bidang Bina Marga

- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan: Melaksanakan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan serta jembatan.
- b. Seksi dalam Bidang Bina Marga
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan: Mengelola proyek pembangunan jalan baru.
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan: Melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jalan.
 - 3) Seksi Pembangunan Jembatan: Mengawasi pembangunan jembatan baru.

6. Bidang Cipta Karya

- a. Pengembangan Infrastruktur Dasar: Melaksanakan proyek air bersih, pengelolaan limbah, dan drainase.
- b. Seksi dalam Bidang Cipta Karya
 - 1) Seksi Pengembangan Air Bersih: Merencanakan dan melaksanakan penyediaan air bersih.
 - 2) Seksi Bangunan Gedung: Mengelola pembangunan gedung pemerintah.
 - 3) Seksi Pembangunan Drainase: Membangun dan memelihara sistem drainase.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pelaksanaan Proyek di Tingkat Kecamatan: Melaksanakan tugas teknis di wilayah kerja tertentu, termasuk pengawasan proyek lokal.